

PENGEMBANGAN PENDIDIKAN *FINANCIAL LITERACY* BERBASIS NILAI-NILAI ANTI KORUPSI SEBAGAI INVESTASI SOSIAL: SEBUAH PEMIKIRAN

Ikka Nur Wahyuni
Magister Pendidikan Ekonomi, Universitas Sebelas Maret Surakarta
ikka@student.uns.ac.id

ABSTRAK

Investasi sosial adalah salah satu komponen investasi pada sumber daya manusia untuk memajukan kesejahteraan agar setiap individu maupun kelompok agar dapat berkontribusi bagi penciptaan kesejahteraan. Beberapa tahun terakhir banyak negara maju dan berkembang mengkhawatirkan masalah tingkat *Financial Literacy* yang merupakan salah satu komponen sumberdaya manusia, komponen ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan. Kekurangan *Financial Literacy* merupakan salah satu faktor yang menyebabkan krisis keuangan terjadi, sehingga *Financial Literacy* sekarang diakui secara global sebagai elemen penting dari stabilitas ekonomi, keuangan, dan pembangunan. (INFE dikutip OECD, 2012:7). Edukasi dan sosialisasi *Financial Literacy* saat ini masih diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah menetapkan peraturan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dengan tingkat kepatuhan ketentuan edukasi dan perlindungan konsumen masih rendah dengan kegiatan edukasi masih terdapat kerancuan antara kegiatan edukasi dengan *marketing*. Rendahnya tingkat *Financial Literacy* masyarakat berbanding terbalik dengan tingginya nilai korupsi di Indonesia. Indonesia tercatat sebagai negara dengan peringkat korupsi 107 dari 174 negara (TII:2015). Edukasi dan sosialisasi mengenai nilai-nilai anti korupsi sudah dilakukan oleh pihak KPK dan mulai dilaksanakan oleh pihak lembaga pendidikan dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam pembelajaran tertentu, misal Pendidikan Kewarganegaraan, Agama, Ekonomi, dan lainnya. Namun edukasi *Financial Literacy* masih dilakukan oleh pihak OJK bersama PUJK saja. Edukasi mengenai *Financial Literacy* dan nilai-nilai korupsi merupakan salah satu bentuk investasi sosial untuk meningkatkan modal manusia Indonesia ke depan yang hendaknya dapat dilaksanakan juga oleh masyarakat dan dunia pendidikan.

Kata kunci: *Financial Literacy*, anti korupsi, integrasi, investasi sosial

I. PENDAHULUAN

Financial Literacy merupakan kemampuan seseorang dalam mengelola keuangannya. (Chen dan Volpe, 1998:108). Beberapa tahun terakhir, banyak negara maju dan negara berkembang mengkhawatirkan masalah tingkat *Financial Literacy* warganya. Kekurangan *Financial Literacy* merupakan salah satu faktor yang menyebabkan krisis keuangan terjadi, akibatnya *Financial Literacy* sekarang diakui secara global sebagai elemen penting dari stabilitas ekonomi, keuangan, dan pembangunan. (INFE dikutip OECD, 2012:7). Pentingnya *Financial Literacy* bagi masyarakat menjadikan OECD memasukkan komponen *Financial Literacy* sebagai salah satu pengukuran pada *Programme for International Students* (PISA). Meskipun *Financial Literacy* penting, namun penelitian yang dilakukan oleh Mastercard menunjukkan masyarakat Indonesia mempunyai skor di bawah rata-rata skor negara yang ada di Asean, padahal *Financial Literacy* merupakan salah satu komponen sumberdaya manusia yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan.

Edukasi dan sosialisasi *Financial Literacy* saat ini masih diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah menetapkan peraturan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK). Namun pada kenyataannya, Jumlah PUJK yang menyampaikan laporan Rencana Edukasi hanya 438 PUJK dari 2.333 PUJK yang ada di Indonesia atau 15,78% saja. Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan ketentuan edukasi dan perlindungan konsumen masih rendah. Kegiatan edukasi yang telah dilaksanakan masih terdapat kerancuan antara kegiatan edukasi dengan *marketing* sehingga tujuan dari edukasi *Financial Literacy* kerap tidak tercapai. (OJK:2015)

Tingkat *Financial Literacy* masyarakat Indonesia berbanding terbalik dengan tingkat korupsi negara Indonesia. Tercatat Indonesia menduduki peringkat 107 dari 174 negara terbersih dari korupsi, sehingga keterserapan anggaran bagi pembangunan nasional, serta investasi bagi sumberdaya manusia tidak terlaksana dengan baik sehingga dibutuhkan penanggulangan korupsi yang masif. Lukman (2010) menjelaskan ada dua langkah untuk menanggulangi korupsi yakni langkah represif dan preventif. Ketika pemerintah melaksanakan hukum yang tegas bagi pelaku korupsi sebagai langkah represif, maka dunia pendidikan dapat melakukan langkah preventif dengan mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi pada materi pembelajaran.

II. KAJIAN TEORI

Pendidikan sebagai Investasi Sosial

Investasi sosial merupakan salah satu aspek dari *investment in human capital*. Menurut Midgley (1999), strategi yang digunakan dalam pembangunan sosial mencakup investasi pada pengembangan sumber daya manusia, program-program perluasan lapangan kerja dan kewirausahaan, pembentukan modal sosial, pengembangan aset, penghematan, dan penghapusan berbagai pembatasan terhadap partisipasi di bidang ekonomi.

Taylor-Gooby (2000) menganggap investasi sosial dibutuhkan karena dalam konteks globalisasi ekonomi, tersedianya lapangan kerja yang memadai, pemerataan pendapatan yang adil dan semakin ringannya biaya pelayanan publik tidak mungkin bisa tercapai. Sehingga untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat negara hanya dapat melakukan perbaikan melalui pembiayaan-pembiayaan sosial berbentuk investasi pada sumberdaya manusia dan perluasan peluang-peluang bagi setiap individu anggota masyarakat. Investasi sosial harus difokuskan pada upaya penjaminan agar tiap-tiap individu punya kemampuan dan kualitas yang diperlukan untuk bekerja, bertahan hidup, dan menjalankan fungsinya sebagai warga negara saat ini dan mempersiapkannya untuk menghadapi masa depan. Strategi yang dapat diterapkan adalah dengan mengalokasikan anggaran publik untuk program-program pemberdayaan dan pendidikan bagi anak-anak yang berkaitan dengan *life skill education* karena anak-anak inilah calon tenaga kerja di masa mendatang, sehingga dengan menyiapkan mereka sejak dini maka di masa mendatang akan lahir tenaga-tenaga kerja yang berkualitas dan memiliki daya saing global.

Giddens (1998) mengembangkan konsep investasi sosial sebagai investasi pada sumber daya manusia untuk memajukan kesejahteraan agar setiap individu maupun kelompok dapat berkontribusi bagi penciptaan kesejahteraan. Investasi sosial terutama diarahkan pada program peningkatan keterampilan, riset, teknologi, pemeliharaan anak-anak dan pemberdayaan komunitas sebagai upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Asumsinya, menurut Giddens, melalui program-program investasi sosial tersebut, pemerintah dapat melengkapi masyarakatnya dengan kemampuan untuk merespon dan beradaptasi dengan perubahan ekonomi global yang selanjutnya dapat meningkatkan daya saing. Investasi pada pendidikan seumur hidup (*life long learning*), kesehatan, dan pengembangan komunitas sebagai basis modal sosial merupakan langkah strategis untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas di masa mendatang. Demikian pula investasi pada penguatan modal sosial dan kohesi komunitas dapat memperkuat solidaritas sosial yang berfungsi sebagai daya rekat bagi stabilitas sosial yang lebih baik. Dengan demikian, menurut Giddens, investasi sosial bukan hanya diarahkan bagi individu semata, tapi juga bagi komunitas karena individu hidup di tengah-tengah komunitas dan kondisi sosial yang baik akan menjadi faktor pendukung yang kuat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, investasi sosial diarahkan sebagai prakondisi untuk menunjang pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tidak hanya diciptakan melalui pengelolaan faktor-faktor produksi, tapi juga melalui pemberdayaan sosial.

Konsep pendidikan sebagai sebuah investasi (*education as investement*) telah berkembang secara pesat dan semakin diyakini oleh negara bahwa pembangunan sektor pendidikan harus dibangun terlebih dahulu sebelum yang lain. Konsep tentang investasi sumber daya manusia (*human capital investment*) yang dapat menunjang pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), sebenarnya telah mulai dipikirkan mulai era Adam Smith (1776), Heinrich Von Thunen (1875) dan para ekonom klasik sebelum abad ke 19 yang menekankan pentingnya investasi keterampilan manusia.

Theodore Schultz pada tahun 1960 menyampaikan pidato berjudul "*Investement in human capital*" dihadapan The American Economic Association yang menjadi dasar teori *human capital* modern. Pesan utama dari pidato tersebut sederhana bahwa proses perolehan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan bukan merupakan suatu bentuk konsumsi yang menghabiskan anggaran, akan tetapi

juga merupakan suatu investasi. Schultz (1960) kemudian memperhatikan bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokus intinya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi dari tenaga kerja. Penemuan dan cara pandang ini telah mendorong ketertarikan sejumlah ahli untuk meneliti mengenai nilai ekonomi dari pendidikan. Perkembangan konsep *investment in human capital* telah mempengaruhi pola pemikiran berbagai pihak, termasuk pemerintah, perencana, lembaga-lembaga internasional, dan peneliti, serta para pelaksana dalam pembangunan sektor pendidikan dan pengembangan modal manusia.

Di negara-negara maju, paradigma pendidikan sebagai aspek konsumtif telah bergeser, pendidikan telah dianggap sebagai investasi modal manusia (*human capital investement*) dan menjadi salah satu sektor utama. Oleh karena perhatian pemerintah terhadap pembangunan sektor pendidikan mulai meningkat, mulai dari anggaran sektor pendidikan yang tidak kalah dengan sektor lainnya, sehingga keberhasilan investasi pendidikan berkorelasi dengan kemajuan pembangunan makronya.

Financial Literacy

Financial Literacy adalah kemampuan mengelola keuangan pribadi (Chen dan Volpe, 1998:108). Kemampuan mengelola keuangan pribadi dibutuhkan individu untuk memanfaatkan produk keuangan secara optimal yang akan berpengaruh terhadap kualitas manusia. *Financial Literacy* menurut Huston (2010: 307-308) diartikan sebagai komponen sumber daya manusia yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan. Seseorang dikatakan melek keuangan ketika memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut.

Robert T. Kiyosaki (2003:57) menjelaskan *financial literacy* sebagai kemampuan untuk membaca dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan masalah finansial/keuangan. Vitt, et. Al (2000) menyebutkan bahwa *Financial Literacy* adalah kemampuan untuk membaca, menganalisis, mengelola, dan berkomunikasi tentang kondisi keuangan pribadi yang mempengaruhi kesejahteraan ekonomi. Hal ini mencakup kemampuan untuk membedakan pilihan keuangan, mendiskusikan masalah keuangan, perencanaan masa depan, dan kompetensi merespon peristiwa kehidupan yang mempengaruhi keputusan keuangan sehari-hari maupun peristiwa dalam perekonomian secara umum. *Financial Literacy* menurut Remund (2010) adalah ukuran sejauh mana seseorang memahami kunci konsep keuangan, memiliki kemampuan serta percaya diri untuk mengelola keuangan pribadi dengan tepat, baik perencanaan keuangan jangka pendek maupun jangka panjang serta sadar terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Perbedaan tingkat *financial literacy* tiap orang berbeda-beda, hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan signifikan antara individu satu dengan yang lainnya dalam proses mengumpulkan aset baik jangka pendek maupun jangka panjang. Huston (2010) menjelaskan bahwa faktor-faktor seperti kebiasaan, kognitif, ekonomi, keluarga, teman sebaya, komunitas, dan institusi dapat berdampak pada kebiasaan keuangan (*financial behaviour*). Seseorang dikatakan melek keuangan (*financial literate*) ketika seseorang memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan tersebut.

Chiara Monticone (2010) menjelaskan bahwa tingkat *financial literacy* seseorang dipengaruhi oleh: karakteristik demografi (gender, etnis, pendidikan dan kemampuan kognitif), latar belakang keluarga, kekayaan, serta preferensi waktu. Angelo Capuano dan Ian Ramsay (2011) menjelaskan bahwa faktor personal (intelektual dan kemampuan kognitif), sosial dan ekonomi dapat mempengaruhi *financial literacy* dan *financial behaviour* seseorang.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *Financial Literacy* adalah kemampuan mengelola keuangan untuk meningkatkan kesejahteraan dan terdapat faktor yang dapat mempengaruhi *Financial Literacy* baik faktor dari dalam diri individu seperti kemampuan kognitif dan psikologi maupun faktor di luar individu seperti keadaan sosial dan ekonomi.

Korupsi

Korupsi dan koruptor berasal dari bahasa latin *corruptus*, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya (Azhar, 2003:28). Sedangkan kata *corruptio* berasal dari kata kerja *corrumpere*, yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok, orang yang dirusak, dipikat, atau disuap (Nasir, 2006:281-282).

Korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi (Anwar, 2006:10). Masyarakat pada umumnya menggunakan istilah korupsi untuk merujuk kepada serangkaian tindakan-

tindakan terlarang atau melawan hukum dalam rangka mendapatkan keuntungan dengan merugikan orang lain. Hal yang paling mengidentikkan perilaku korupsi bagi masyarakat umum adalah penekanan pada penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan publik untuk keuntungan pribadi.

Dalam Kamus Lengkap Oxford (*The Oxford Unabridged Dictionary*) korupsi didefinisikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa. Sedangkan pengertian ringkas yang dipergunakan World Bank, korupsi adalah penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi (*the abuse of public office for private gain*).

Definisi lengkap korupsi menurut Asian Development Bank (ADB) adalah korupsi melibatkan perilaku oleh sebagian pegawai sektor publik dan swasta, dimana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum memperkaya diri mereka sendiri dan atau orang-orang yang dekat dengan mereka, atau membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut, dengan menyalahgunakan jabatan dimana mereka ditempatkan.

Dengan melihat beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa korupsi secara implisit adalah menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum. Dari beberapa definisi tersebut juga terdapat beberapa unsur yang melekat pada korupsi. Pertama, tindakan mengambil, menyembunyikan, menggelapkan harta negara atau masyarakat. Kedua, melawan norma-norma yang sah dan berlaku. Ketiga, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau amanah yang ada pada dirinya. Keempat, demi kepentingan diri sendiri, keluarga, kerabat, korporasi atau lembaga instansi tertentu. Kelima, merugikan pihak lain, baik masyarakat maupun negara.

Menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 buah Pasal dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam tiga puluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi yang dapat dikelompokkan; kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara karena korupsi (KPK, 2006: 19-20).

Dalam UU No. 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ada sembilan tindakan kategori korupsi dalam UU tersebut, yaitu: suap, illegal profit, secret transaction, hadiah, hibah (pemberian), penggelapan, kolusi, nepotisme, dan penyalahgunaan jabatan dan wewenang serta fasilitas negara.

III. PENDIDIKAN *FINANCIAL LITERACY* BERBASIS NILAI-NILAI ANTI KORUPSI SEBAGAI INVESTASI SOSIAL

Secara teori, pembangunan *Financial Literacy* dan *financial inclusion* penting sebagai modal manusia dan juga mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Evans:2012). Edukasi mengenai *Financial Literacy* merupakan salah satu bentuk investasi sosial yang sangat berdampak pada perekonomian. Giddens (1998) mengembangkan konsep investasi sosial sebagai investasi pada sumber daya manusia untuk memajukan kesejahteraan agar setiap individu maupun kelompok dapat berkontribusi bagi penciptaan kesejahteraan. Investasi sosial terutama diarahkan pada program peningkatan keterampilan, riset, teknologi, pemeliharaan anak-anak, serta pemberdayaan komunitas sebagai upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Modal yang dikombinasikan dengan rendahnya pembangunan manusia hanya akan menghasilkan pertumbuhan yang rendah serta peningkatan kemiskinan (Bergheim:2010). Sehingga penting bagi pemerintah untuk membekali penduduk dengan kemampuan agar masyarakat mampu mencapai potensinya, berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi global, dan dapat mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan mempunyai kehidupan yang lebih baik. Hasil survey OECD menunjukkan orang dewasa yang memiliki kemampuan mempunyai kesempatan dua kali lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan. Golongan masyarakat yang dibekali keterampilan juga mempunyai kesempatan tiga kali lebih besar untuk mempunyai pendapatan di atas rata-rata.

Krisis ekonomi yang sedang terjadi menunjukkan pentingnya kemampuan investasi dari masyarakat, baik yang didapatkan dari pendidikan maupun keterampilan dunia kerja. Memajukan investasi pendidikan dan keterampilan adalah kunci pertumbuhan masa depan yang dapat meningkatkan produktivitas. Selain itu investasi dalam pendidikan dan keterampilan adalah solusi utama dari permasalahan klasik yang ada yakni pengangguran dan problema kesetaraan gender.

Temuan Byrne (2007) menyebutkan bahwa pemahaman keuangan yang rendah menyebabkan kesalahan dalam penyusunan rencana keuangan dan mengakibatkan bias dalam pencapaian kesejahteraan manakala usia tidak produktif lagi. Tan Beng Wah (2011) menyebutkan, literasi keuangan berkaitan dengan pendidikan konsumen, perlu dilakukan dengan cepat di tingkat nasional untuk bergerak maju. *Financial Literacy* merupakan suatu pengetahuan dan pemahaman mengenai konsep-konsep keuangan dan risiko, keterampilan, motivasi dan kepercayaan diri untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman dalam membuat keputusan yang efektif di berbagai konteks keuangan, serta dalam meningkatkan kesejahteraan keuangan individu dan masyarakat, dan untuk memungkinkan partisipasi dalam kehidupan ekonomi (OECD, 2012 : 13).

Pentingnya *Financial Literacy* membuat banyak negara maju dan negara berkembang khawatir tentang tingkat literasi finansial warganya. Hal ini disebabkan oleh menyusutnya sistem dukungan publik dan swasta, pergeseran demografi, termasuk penuaan penduduk, dan perkembangan keuangan pasar. Kekurangan *Financial Literacy* merupakan salah satu faktor yang menyebabkan krisis keuangan tersebut. Akibatnya, *Financial Literacy* sekarang diakui oleh global sebagai elemen penting dari stabilitas ekonomi, keuangan dan pembangunan (INFE dikutip OECD, 2012 : 7). Pada akhirnya negara-negara mulai untuk memasukkan edukasi *Financial Literacy* pada kurikulumnya, baik dengan mata pelajaran sendiri maupun mengintegrasikannya dengan mata pelajaran yang ada.

Peringkat Indonesia pada pengukuran kemampuan *Financial Literacy* oleh PISA mulai tahun 1995 hingga 2008, termasuk dalam 11 negara terendah, kedua terendah di Benua Asia, dan paling rendah di kawasan Asean. Singapura, negara tetangga merupakan pemilik skor tertinggi dari seluruh negara yang mengikuti PISA, diikuti oleh Finlandia, Irlandia, dan Hongkong (Jappelli:2010). Hasil *Mastercard Financial Literacy Index* pada tahun 2013 pada tabel 1 menyebutkan bahwa Indonesia berada pada posisi terakhir dari tujuh negara Asean yang diteliti.

Tabel 1. *Asean Financial Literacy Index* tahun 2013-2014

No	Ranking Negara	<i>Financial Literacy Index</i>		<i>Financial Literacy Index</i> Perkomponen					
				<i>Basic Money</i>		<i>Financial Planning</i>		Investasi	
		2013	2014	2013	2014	2013	2014	2013	2014
1	Singapura	72	68	73	67	80	77	58	57
2	Malaysia	70	69	67	66	82	80	62	62
3	Filipina	68	66	67	66	74	73	58	56
4	Thailand	68	67	63	63	81	79	61	60
5	Myanmar	66	66	54	66	88	80	-	62
6	Vietnam	63	65	57	59	80	81	52	53
7	Brunei Darussalam	63	60	56	54	-	69	-	58
8	Indonesia	60	61	56	59	75	70	47	55
9	Kamboja	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Laos	-	-	-	-	-	-	-	-
Rata- Rata		66,25	65,25	61,62	62,5	80	76,12	56,3	57,87

Sumber: Mastercard *Financial Literacy Index*, Tahun 2014

Tabel nomor 1 menunjukkan *Financial Literacy index* yang berasal dari komponen pengetahuan dasar tentang uang, perencanaan keuangan, dan juga investasi yang menempatkan masyarakat Indonesia pada posisi kedelapan dari delapan negara yang diteliti pada kawasan Asean.

Pada pengetahuan dasar mengenai uang, Indonesia mendapat nilai di bawah rata-rata skor Asean yang berarti pengetahuan dasar mengenai keuangan dan penggunaannya perlu ditingkatkan. Selain itu dalam ranah perencanaan keuangan Indonesia juga mempunyai skor jauh dari rata-rata skor Asean, yang dapat mengindikasikan adanya banyak masyarakat yang tidak merencanakan penggunaan uang, tabungan, dan hutang dalam jangka panjang, sehingga perilaku masyarakat Indonesia cenderung konsumtif. Di sisi investasi, masyarakat Indonesia belum mempunyai pengetahuan yang cukup, skor yang di bawah rata-rata Asean menunjukkan banyaknya masyarakat yang belum melekat investasi, baik tidak melakukan investasi maupun tidak paham dengan skema investasi yang mengakibatkan banyaknya kasus investasi *bodong* di Indonesia.

Bila dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia masih menyerahkan kegiatan edukasi kepada pihak OJK dan belum melibatkan dunia pendidikan secara masif. Belum ada mata pelajaran yang khusus untuk membahas *Financial Literacy*. Australia mulai menginisiasi strategi peningkatan *Financial Literacy* pada tahun 2011, di tahun 2013 *Australian Securities and Investments Commission* (ASIC) mengembangkan pendidikan *Financial Literacy* salah satunya pada sektor pendidikan formal yakni sekolah dan pendidikan berbasis komunitas masyarakat. Strategi ini dianggap paling efektif untuk memudahkan integrasi *Financial Literacy* ke materi pembelajaran yang ada, hal ini bertujuan agar siswa dapat memahami bahwa *Financial Literacy* tak mengungkung kehidupan mereka hanya di dalam kelas, namun menjadi sebuah nilai yang akan berguna sepanjang hayat (OECD:2012).

Menteri Keuangan Republik Chechnya menerapkan strategi pendidikan *Financial Literacy* pada tahun 2010. Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Pendidikan, Bank Sentral Chechnya dan pakar dari industri keuangan, konsumen, lembaga perlindungan konsumen, dan praktisi melakukan edukasi *Financial Literacy* pada level pendidikan dasar, menengah, dan masyarakat. Menteri Keuangan New Zealand menerapkan strategi pendidikan *Financial Literacy* pada tahun 2008 dengan melakukan edukasi *Financial Literacy* pada level pendidikan dasar, menengah, dan masyarakat untuk mempersiapkan populasi masyarakat yang paham mengenai *Financial Literacy* dan dapat menjadikannya investasi di hari tua.

Rusia di tahun 2011 meluncurkan program pendidikan *Financial Literacy* dan perlindungan konsumen industri keuangan. Target program ini adalah dunia pendidikan dan masyarakat dengan pendapatan yang rendah. Pada tahun 2008, Spanyol telah menerapkan program pendidikan *Financial Literacy* kepada siswa berkerjasama dengan Menteri Ekonomi, Bank Sentral Spanyol, dan Supervisi Perlindungan Spanyol.

Amerika Serikat memiliki Komisi Pendidikan *Financial Literacy*. Pemerintah mengusahakan agar program *Financial Literacy* berjalan dan dapat mendidik anak dan pemuda Amerika tentang kemampuan, pengetahuan, dan kebiasaan *Financial Literacy* agar dapat mempersiapkan masa dewasa yang dapat mengaplikasikan *Financial Literacy* dengan baik.

Menanggapi rendahnya *Financial Literacy* masyarakat, Pemerintah, dalam hal ini pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah melakukan edukasi mengenai *Financial Literacy* dengan berbagai cara untuk menanggulangi rendahnya tingkat *Financial Literacy* masyarakat Indonesia. OJK telah menetapkan peraturan bagi Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) yang berbunyi "Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyelenggarakan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan kepada Konsumen dan/atau masyarakat." (Pasal 14 POJK No. 1/POJK.07/2013). Namun pada kenyataannya, Jumlah PUJK yang menyampaikan Laporan Rencana Edukasi hanya 438 PUJK dari 2.333 PUJK yang ada di Indonesia atau 15,78% saja. (OJK:2015) Hal ini menunjukkan tingkat kepatuhan ketentuan edukasi dan perlindungan konsumen masih rendah. Aktivitas edukasi paling banyak dilaksanakan dalam agenda sosialisasi dan seminar dengan materi paling banyak mengenai pengetahuan sebesar 70,58% dari 980 kegiatan yang dilaksanakan. Kegiatan edukasi yang telah dilaksanakan masih terdapat kerancuan antara kegiatan edukasi dengan *marketing*. Sehingga Indonesia perlu mencontoh sepak terjang beberapa negara yang telah melakukan sinergi antara dunia pendidikan, pemerintah, dan masyarakat dalam peningkatan kualitas *Financial Literacy*.

Di sisi lain, kasus korupsi di Indonesia memang nampak lebih mengkhawatirkan sehingga pemerintah mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa tahun yang lalu. Sepak terjang KPK pun tak hanya memberantas korupsi yang telah terjadi, namun mengedukasi masyarakat untuk tidak melakukan korupsi sebagai tindakan preventif. KPK sudah memposisikan sektor pendidikan menjadi salah satu strategi pencegahan korupsi. Namun, pelaksanaan pendidikan antikorupsi memang belum optimal. Di seluruh satuan pendidikan wajib dasar 9 tahun, pendidikan antikorupsi masih dianggap belum sesuai dengan harapan (KPK, 2015). Belum ada mata pelajaran khusus mengenai korupsi, bergitupun dengan materi pembelajaran. Pengembangan pembelajaran mengenai nilai-nilai anti korupsi sudah jamak dilakukan oleh dunia pendidikan. Integrasi nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran atau materi tertentu kerap menjadi salah satu cara edukasi.

Lukman Hakim (2012) menganggap bahwa pendidikan Agama Islam dapat diintegrasikan dengan Pendidikan Anti Korupsi untuk pencegahan danantisipasi perilaku korupsi. Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Anti Korupsi mempunyai tujuan yang sama dan bisa menjadi pengayaan yang sangat relevan. Pengembangan kurikulum diarahkan pada peningkatan iman dan taqwa, akhlak mulia, potensi, kecerdasan, dan minat sesuai usia perkembangan dengan masalah kontekstual.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Sutriana (2013) pendidikan anti korupsi diintegrasikan dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dan Kantin Kejujuran. Implementasi pendidikan antikorupsi dilaksanakan dengan dicantumkan nilai acuan antikorupsi pada perangkat pembelajaran. Guru mengaitkan materi pelajaran dengan pendidikan antikorupsi sesuai dengan perangkat pembelajaran yang telah disusun. Namun pada kenyataannya belum semua guru melaksanakan hal tersebut. Hal ini disebabkan oleh anggapan pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang membosankan membuat proses internalisasi nilai antikorupsi semakin sulit, sehingga guru harus lebih kreatif. Selain itu, pendidikan anti korupsi kurang bisa diaplikasikan karenakurangnya keteladanan antikorupsi. Kantin kejujuran sebagai salah satu laboratorium pendidikan anti korupsi dalam perkembangannya tidak sedikit yang mengalami kerugian walaupun masih bisa bertahan dan ada juga yang ternyata tidak bisa bertahan lagi. Keadaan tersebut mencerminkan di sekolah masih belum seluruhnya tertanam nilai-nilai antikorupsi pada siswa.

Nurkhasanah (2013) menerapkan nilai-nilai antikorupsi yang terkandung dalam kurikulum PAI di SMA sebagai *hidden curriculum*. Implementasi nilai-nilai antikorupsi dalam pembelajaran dilakukan dengan menekankan nilai-nilai tersebut ketika menjelaskan muatan Pendidikan Agama Islam, juga dengan memberikan wawasan terkait materi-materi antikorupsi kepada peserta didik di sela-sela materi pembelajaran sebagai pengantar atau bahkan sebagai ulasan dan kesimpulan dari materi pokok yang relevan. Integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam PAI bersifat *hidden curriculum* (kurikulum tersembunyi), sehingga termasuk di dalamnya adalah nilai keteladanan, sikap, dan pembiasaan.

Penerapan pembelajaran *Financial Literacy* belum pernah dilaksanakan secara masif di sekolah sebagai sebuah mata pelajaran tersendiri. Riset mengenai penerapan dan integrasi nilai-nilai *Financial Literacy* juga belum banyak dilakukan di Indonesia. Berbanding terbalik dengan Pendidikan Anti Korupsi yang masif dilakukan baik oleh KPK maupun guru-guru dalam pengintegrasian nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran. Pengembangan nilai-nilai anti korupsi dan karakter bangsa diintegrasikan dalam setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nilai-nilai tersebut tercantum dalam silabus dan RPP.

Pengintegrasian dilaksanakan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran. Menurut Supinah (2011:48), integrasi dalam pendidikan dilaksanakan dalam beberapa tahap, antara lain:

1. Perencanaan pembelajaran

Perencanaan pembelajaran meliputi silabus, RPP, dan bahan ajar yang dirancang agar muatan maupun kegiatan pembelajarannya memfasilitasi atau berwawasan, dalam tulisan ini, pendidikan anti korupsi dengan mengadaptasi silabus, RPP, dan bahan ajar yang telah dibuat dengan menambahkan kegiatan pelajaran yang bersifat memfasilitasi dikembangkannya nilai-nilai, disadarinya pentingnya nilai-nilai, dan diinternalisasinya nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang dalam tulisan ini di kembangkan menjadi nilai-nilai anti korupsi.

- a. Silabus.

Silabus membuat standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Pembelajaran yang membantu peserta didik mengembangkan karakter anti korupsi dilakukan perubahan pada tiga komponen silabus yaitu berupa penambahan pada materi *Financial Literacy* (1) Kegiatan pembelajaran, sehingga ada kegiatan pembelajaran yang mengembangkan karakter, (2) Indikator pencapaian, sehingga ada indikator yang terkait dengan pencapaian peserta didik dalam hal karakter, dan (3) Teknik penilaian, sehingga ada teknik penilaian yang dapat mengembangkan atau mengukur perkembangan karakter.

- b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

RPP disusun berdasarkan silabus yang telah dikembangkan oleh sekolah. RPP memberi petunjuk bagi guru dalam menciptakan karakter RPP yang perlu diadaptasi. Adaptasi yang dimaksud adalah berupa perubahan pada komponen RPP yaitu penambahan atau modifikasi pada (1) Kegiatan pembelajaran, sehingga ada kegiatan pembelajaran yang mengembangkan karakter anti korupsi, (2) Indikator pencapaian, sehingga ada indikator yang terkait dengan pencapaian peserta didik dalam hal karakter anti korupsi dan *Financial Literacy*, dan (3) Teknik penilaian, sehingga ada teknik penilaian yang dapat mengembangkan atau mengukur perkembangan karakter dan *Financial Literacy*.

- c. Bahan Ajar.

Bahan ajar sejalan dengan apa yang telah dirancang dalam silabus dan RPP yang bermuatan pendidikan anti korupsi dan *Financial Literacy*. Penyesuaian yang paling mungkin dilaksanakan

oleh guru adalah dengan cara menambahkan kegiatan belajar yang sekaligus dapat mengembangkan nilai-nilai anti korupsi dan *financial literacy*.

2. Pelaksanaan Pembelajaran.

Kegiatan pelaksanaan dari tahapan kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup, dipilih dan dilaksanakan agar peserta didik dapat mengaplikasikan nilai-nilai anti korupsi dan pengetahuan *Financial Literacy* yang diajarkan.

a. Kegiatan Pendahuluan.

Kegiatan awal dalam suatu pertemuan pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan mengalihkan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Pada pelaksanaan pembelajaran dalam kegiatan pendahuluan guru (1) menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, (2) mengajukan pertanyaan yang mengkaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari (apersepsi), (3) menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, dan (4) menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai silabus.

b. Kegiatan Inti.

Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis. Contoh nilai anti korupsi yang ditanamkan dari proses pembelajaran *Financial Literacy* adalah kejujuran dalam mengelola keuangan

c. Penutup.

Kegiatan untuk mengakhiri aktivitas pembelajaran dalam bentuk rangkuman, penilaian, umpan balik, dan tindak lanjut, menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

3. Penilaian Pembelajaran

Penilaian hasil belajar adalah kegiatan ditujukan untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan pembelajaran dari proses pembelajaran yang telah dilakukan. Teknik dan instrumen yang dipilih dan dilaksanakan tidak hanya mengukur pencapaian kognitif tetapi juga perkembangan kepribadian peserta didik. Penilaian pencapaian tidak hanya dalam kemampuan *Financial Literacy* namun juga dalam aplikasi nilai-nilai anti korupsi dalam pembelajaran yang dilakukan secara terus menerus.

Berdasarkan integrasi nilai-nilai anti korupsi dan pendidikan *Financial Literacy* di atas, pendidikan ini diharapkan dapat diterapkan pada semua jenjang agar terjadi kesinambungan di tiap level pendidikan. Ketika terjadi peningkatan kualitas *Financial Literacy* maka akan diikuti oleh kesadaran keuangan yang akan meningkatkan perekonomian. Namun diperlukan juga penanaman nilai-nilai anti korupsi agar kemahiran dalam mengelola keuangan diikuti dengan perilaku anti korupsi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas sumberdaya manusia secara optimal karena tingginya keterserapan anggaran untuk pembangunan dan tingginya kualitas manusia yang mampu mengelolanya.

IV. PENUTUP

Simpulan

1. Pendidikan merupakan salah satu komponen investasi sosial yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia.
2. *Financial Literacy* merupakan salah satu komponen sumberdaya manusia, komponen ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan keuangan. *Financial Literacy* masyarakat Indonesia rendah, berbanding terbalik dengan tingkat korupsi di Indonesia.
3. Sudah ada pendidikan anti korupsi yang masif dengan sistem integrasi pada pelajaran yang ada, namun belum ada pendidikan *Financial Literacy* yang masih
4. Perlu integrasi nilai-nilai anti korupsi pada pendidikan *Financial Literacy* untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia agar memiliki kemampuan pengelolaan keuangan yang juga bernilai anti korupsi agar manusia Indonesia masa depan dapat mengelola keuangannya dengan baik dan tanpa korupsi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Yang Maha Kuasa atas nikmatnya selama ini. Tanpa kasih dan hidayah-Nya tulisan ini hanyalah sebuah wacana. Terimakasih atas supportnya kepada Bapak, Ibu dan Keluarga Yusuf Pratama, rekan-rekan di Dompet Dhuafa, FoSSEI Yogyakarta, serta dosen dan rekan di Magister Pendidikan Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

REFERENSI

- Ancok, D. (2002). *Outbound Management Training: Aplikasi Ilmu Perilaku dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jogjakarta: UII Press.
- Bergheim, S. 2010. *Human Capital is the key to growth: Success stories and the policies for 2020*, Frankfurt, Germany: Deutsche Bank Research, 2005
- Cunningham, I. (2002). *Developing human and social capital in organisations*, Industrial and Commercial Training, Vol. 34, No.4.
- Evans, A D and CJ Green & V Murinde. 2002. *Human Capital and Financial Development in Economic Growth: New Evidence Using the Translog Production Function*, *International Journal of Financial Economics*, 7, 123-140, 2002.
- Giddens, Anthony. 2003. *Jalan Ketiga dan Kritik-kritiknya*. Edisi terjemahan, dari buku "The Third Way and Its Critiques", diterbitkan oleh Polity Press, Cambridge, 2000.
- Hakim, Lukman. (2012). *Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam*. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim Volume 10 Nomor 2*.
- Hasan, Said Hamid. 2010. *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum.
- Huston, Sandra J. (2010). *Measuring financial literacy*. *The Journal of Consumer Affairs*, 44(2), 296-316. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1745-6606.2010.01170.pdf>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2015.
- Jappelli, Tullio. 2010. *Financial Literacy An International Comparison*. *Network for Studies on Pensions, Aging, and Retirement Discussion Paper 09/2010/064*.
- Lister, Ruth. 2004. "New Policy Directions in OECD Countries: The Emergence of The Social Investment State". Makalah, disampaikan pada seminar Exploring New Approaches to Social Policy: PRI Conference. Ottawa: Canada, 13 – 15 Desember.
- Nurkasanah, Siti. (2013). *Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum Pendidikan Agama Islam di SMA Negeri 1 Kasihan Bantul*. Skripsi. <http://www1.mastercard.com/content/intelligence/en/research/reports/2015/mastercard-financial-literacy-index-report-2014h1.html>
- OECD. 2014. *PISA 2012 Results: Students and Money, Financial Literacy Skills for the 21st CENTURY (Volume VI)*. OECD.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2013). *Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia*. Jakarta
- Otoritas Jasa Keuangan. (2015). *Laporan Rencana dan Pelaksanaan Edukasi PUJK 2014 serta Laporan Rencana Edukasi PUJK 2015*. Jakarta
- Pani, N & K Jafar. 2010. 'Mass Education-led Growth and Non-agrarian Villages: Long-term Results of the Kerala Model', *Oxford Development Studies*
- Perkins, Daniel, Lucy Nelms dan Paul Smyth. 2004. *Beyond Neo-Liberalism: The Social Investment State?* Australia: Centre for Public Policy University of Melbourne.
- Supinah dan Ismu. 2011. *Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa*. Yogyakarta.
- Tan Beng Wah. 2011. *Of Value Proposition & Financial Literacy*, *The 4E journal*, vol.11 No.2, 2Q Certified Financial Planner® (CEP) Penerjemah: Imam Khoiri. Yogyakarta: IRCiSoD.

Abstrak Bahasa Inggris
mohon dicantumkan

Lolos dengan revisi